

BAB III

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo dalam Pemindahan Ibu Kota Negara

Kebijakan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “bijak” yang artinya selalu menggunakan akal budinya, pandai, dan mahir. Sedangkan kebijakan sendiri bermakna sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).⁶²

Pada zaman Presiden ke-1 Indonesia yaitu pada pemerintahan Presiden Soekarno telah ada wacana memindahkan ibu kota Negara Indonesia ke pulau Kalimantan tepatnya di Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangkaraya. Presiden Soekarno memilih Palangkaraya, karena Kota Palangkaraya (Kalimantan Tengah) terletak ditengah-tengah Negara Indonesia. Tetapi rencana tersebut tidak terealisasi untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo timbul kembali rencana perpindahan ibu kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan kabupaten Kutai

⁶² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.* h . 375.

Kartanegara. Pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi pemindahan ibu kota baru Republik Indonesia.

Ada beberapa rencana kebijakan pemindahan ibu kota Negara Indonesia ini antara lain ialah masalah-masalah besar yang terjadi di ibu kota lama yakni Jakarta masih sering terjadi, dan juga ancaman-ancaman baru yang akan melanda ibu kota Jakarta jika tidak diambil kebijakan. Alasan utama pemerintah dalam pemindahan ibu kota ini yaitu pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat perdagangan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat pemerintahan, pusat jasa, dan juga bandar udara serta pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Kedua, beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kemacetan, kepadatan penduduk lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera ditanggulangi.

Ada beberapa penyebab pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru yaitu risiko bencana alam yang rendah mengingat pulau Kalimantan jarang terdengar berita tentang bencana alam, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Lokasi yang berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda, serta lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Keempat, telah

memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare.⁶³

Pemerintah menegaskan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam. Dan ibu kota lama yaitu Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global seperti kota Kuala Lumpur dan Seoul. Dan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.⁶⁴

B. Latar Belakang Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia

Kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian Kawasan Penajam Paser Utara dan sebagian Kawasan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2024 mendatang. Rencana pemindahan ibu Kota negara ini

⁶³ Buku Saku, *Pemindahan Ibu Kota Negara*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Juli 2021. h .13

⁶⁴ Erna Irawati, Ambar Widaningrum. *Konsep Studi Kebijakan Publik*. (dalam Modul Pelatihan Analisis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara, 2020) h. 15-17.

tentunya telah melewati kajian, penelitian serta konsultasi publik yang cukup lama.

Wacana pemindahan ibu kota awalnya muncul di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, bahkan sudah ada sejak zaman kolonial. Lalu sejarah pemindahan ibu kota sebagai pusat pemerintahan berlanjut hingga masa kemerdekaan. Secara konstitusional, tindakan hukum pemindahan ibu kota merupakan kebijakan hukum yang sangat masa depan dan sangat penting bagi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemindahan ibu kota setelah kemerdekaan dilakukan, namun dalam rangka keadaan darurat negara. Dalam sejarah, ibu kota Indonesia pernah beberapa kali pindah ke Yogyakarta, dan Bukittinggi merupakan ibu kota pemerintahan darurat saat itu.

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini tidak lepas dari tujuan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya mengurangi kesenjangan ekonomi diberbagai daerah di Indonesia yaitu dengan pemerataan pusat pertumbuhan yang baru yang bisa mendorong majunya ekonomi diseluruh wilayah Indonesia. kemudian pemerintah memilih kawasan di Kalimantan Timur yang dinilai dari sisi sosial, infrastruktur dan ekonomi sudah siap. Karena lokasi yang dipilih sudah terbiasa dengan kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Pemindahan ibu kota negera ini diharapkan akan mengurangi kesenjangan antara pulau

Jawa dan luar Jawa. Provinsi Kalimantan Timur menjadi tempat yang strategis karena wilayahnya berada di tengah Indonesia.

Menilik kembali sejarah yang ada, keputusan pemindahan ibu kota pemerintahan Jokowi dinilai telah memenuhi faktor penting, yaitu faktor seperti kemacetan lalu lintas, kemudian banjir, menurunnya permukaan tanah di Jakarta Utara karena kenaikan permukaan laut yang terus meningkat, bahkan sampai ada yang memprediksi bahwa tiga puluh tahun yang akan datang, Jakarta Utara akan tenggelam. Belum lagi faktor-faktor lain seperti kepadatan penduduk, polusi udara dan air yang semakin parah. Itulah yang menjadikannya sebagai faktor penentu dalam pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.⁶⁵

Faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pemindahan Ibu Kota Jakarta yaitu:

1. Kepadatan Penduduk

57% Penduduk Indonesia Terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan ketimpangan penyebaran penduduk di wilayah Indonesia. jumlah penduduk merupakan salah satu tolak ukur sebagai pertanda besarnya suatu kota. Jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu terus bertambah dengan angka yang tinggi setiap tahunnya. Hal ini akan

⁶⁵ Buku Saku, *Op.cit.*,h. 3-9.

menimbulkan kepadatan penduduk dengan lahan kota yang terbatas luasnya.⁶⁶

Dengan meningkatnya jumlah kepadatan penduduk di kota tersebut maka bertambah pula keperluan pelayanan fasilitas umum untuk penduduk kota tersebut. Faktanya fasilitas yang telah ada saat ini masih kurang dibanding dengan padatnya penduduk, hal ini akan menimbulkan ketimpangan, ketidakseimbangan serta kekurangan. Hal-hal yang seperti inilah yang menimbulkan kemafsadatan atau hal-hal negative dikemudian hari.

Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kurangnya sarana atau fasilitas pelayanan penduduk maka akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan. Hal ini dapat kita kaitkan dengan perlunya *hifz nafs* atau penjagaan jiwa karena kurangnya ketersediaan kebutuhan pokok manusia seperti kurangnya ketersediaan lahan untuk membangun rumah. Seperti yang kita ketahui saat ini masih banyak penduduk Jakarta yang membangun rumah di area yang kumuh selain itu masih banyak penduduk yang tidak memiliki hunian tetap. Dalam hal ini kebutuhan pokok manusia dalam *maqashid al-Syari'ah* termasuk pada tingkat *dharuriyah* atau kemaslahatan primer.⁶⁷ Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi

⁶⁶ Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Adisasmita, *Op.cit.*, h. 88.

⁶⁷ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011) h. 236.

permasalahan ini ialah dengan mengurangi laju urbanisasi masyarakat Indonesia yang ingin merantau ke kota-kota besar.

2. Kontribusi Ekonomi yang Tidak Merata

Jakarta memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan Industri, pusat pemerintahan dan sebagai pusat jasa transportasi yang menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan dengan laju ekonomi yang tinggi di Indonesia.

Dampak dari berbagai kegiatan ekonomi tersebut ada dua yaitu dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya yaitu terjadinya efisiensi dalam kegiatan usaha yang berpeluang meningkatkan usahanya dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Di lain sisi dampak negatifnya yaitu usaha yang dimiliki oleh masyarakat kecil tidak mampu bersaing sehingga menimbulkan kerugian oleh masyarakat kecil. Selain itu kepadatan perekonomian di Jakarta akan berdampak pada majunya ekonomi di Jakarta sehingga terjadi ketidakmerataan perekonomian terhadap wilayah lain di luar pulau Jawa.⁶⁸ Dalam *Maqashid al-Syari'ah* hal ini termasuk pada *hifz mall* atau pemeliharaan harta.⁶⁹ Sehingga salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan memindahkan pusat

⁶⁸ Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Adisasmita, *Op.cit.*, h. 91.

⁶⁹ Abdul Rahman Dahlan, *Op.cit.*, h. 237.

kegiatan ekonomi ke tempat yang baru sehingga terjadinya pemerataan kontribusi ekonomi di setiap wilayah di Indonesia.

3. Krisis Ketersediaan Air di Pulau Jawa Terutama DKI Jakarta

Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa 80% air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta tidak memenuhi standar Menteri Kesehatan No. 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Jakarta bagian utara merupakan wilayah terparah dimana secara umum air tanahnya mengandung unsur besi dengan kadar yang tinggi serta kandungan natrium yang berakibat pada kualitas air di Jakarta. Selain krisis air bersih Jakarta juga menghadapi penurunan permukaan tanah. Secara umum laju penurunan tanah di wilayah Jakarta berkisar antara 0 - 18,2/tahun. Penurunan muka tanah ini akibat dari eksploitasi air tanah yang berlebihan.⁷⁰ Pengambilan air tanah yang berlebihan dalam volume yang besar dampaknya akan menurunkan permukaan tanah secara cepat. Daerah Jakarta dan sekitarnya telah banyak gedung-gedung bertingkat perkantoran dan pemukiman penduduk yang melakukan penyedotan air bawah tanah dalam volume yang sangat besar maka tidak membingungkan lagi permukaan tanah di

⁷⁰ Badan Geologi: *Jakarta Alami Krisis Air Bersih*. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/badan-geologi-jakarta-alami-krisis-air-bersih->. Diakses pada tanggal 28 September 2022, pukul 21.26.

Jakarta mengalami penurunan yang signifikan serta mengalami krisis air bersih untuk penduduknya.⁷¹

Kondisi tersebut menyebabkan kurangnya ketersediaan air bersih dan penurunan permukaan tanah. Hal yang seperti ini menjadi masalah serius bagi penduduk Jakarta yang akan mengancam pemeliharaan jiwa manusia (*hifz nafs*) yang merupakan tingkatan dari *maqashid adharuriyah*.

4. Pertumbuhan Urbanisasi Sangat Tinggi

Adanya urbanisasi yang berlebih ini telah menimbulkan berbagai masalah di Indonesia. Masalah yang terjadi antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat, peningkatan *urban crime* dan masih banyak masalah lain. Urbanisasi dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan⁷² fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian, urbanisasi sejatinya merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Perkembangan urbanisasi di Indonesia sendiri perlu diamati secara serius. Salah satu kota yang telah mengalami hal ini adalah kota Jakarta sebagai ibu kota dari

⁷¹ Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Adisasmita, *Opcit.*, h. 97.

⁷² Sven E. Jørgensen, Liu Xu, Robert Costanza, “*Handbook of Ecological Indicators for Assessment of Ecosystem Health, Second Edition (Applied Ecology and Environmental)*”. (CRC Press, Boca Raton, London 2010). h. 430.

negara Indonesia sendiri. Dimulai sebagai kota besar kemudian berkembang menjadi kota metropolitan dan saat ini mengarah menjadi kota megapolitan.⁷³

Kondisi perkotaan yang semakin tidak terkendali akibat adanya urbanisasi yang berlebih, telah menimbulkan berbagai masalah baru seperti meningkatnya kriminalitas akibat kemiskinan, pengangguran besar-besaran, bertambahnya pemukiman kumuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, urbanisasi akan dilihat sebagai faktor penentu bagi sebuah kota dapat berkembang baik secara fisik, maupun secara sosial. Dengan begitu, bentuk atau pengertian dari urbanisasi itu dapat dilihat dengan lebih jelas juga akibat dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan di kota. Dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh tingginya arus urbanisasi di Indonesia adalah sebagai berikut : Semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan. Pertambahan penduduk kota yang begitu pesat sulit diikuti kemampuan daya dukung kotanya. Saat ini, lahan kosong di daerah perkotaan sangat jarang ditemui. Lalu dampak urbanisasi juga menambah polusi di daerah perkotaan. Masyarakat yang melakukan urbanisasi baik dengan tujuan mencari pekerjaan maupun untuk memperoleh pendidikan, umumnya memiliki kendaraan. Pertambahan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang

⁷³ Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Adisasmita, *Op.cit.*, h. 101.

membanjiri kota yang terus menerus, menimbulkan berbagai polusi atau pencemaran seperti polusi udara dan kebisingan atau polusi suara bagi manusia. Urbanisasi juga salah satu penyebab kemacetan lalu lintas, padatnya penduduk di kota menyebabkan kemacetan dimana-mana.⁷⁴

5. Ancaman Bahaya Banjir di Jakarta

Secara geologi dan geomorfologi wilayah DKI Jakarta sendiri sejak dulu memang sudah merupakan daerah banjir. Selain itu, dengan keberadaan morfometri dari ke-13 aliran sungai yang melintasi wilayah DKI Jakarta juga menjadi akses bagi aliran air permukaan (*direct runoff*) yang bersumber dari curah hujan di daerah hulu untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta. Jadi, memang sudah kodratnya bahwa wilayah DKI Jakarta adalah merupakan daerah banjir. Pembangunan infrastruktur banjir dan upaya konservasi lingkungan untuk memperbaiki kondisi *catchment area* yang telah rusak dan jauh berkurang luasannya hanyalah merupakan langkah-langkah untuk mengurangi potensi resiko bencana banjir, bukan bersifat menghilangkan resiko banjir menjadi tidak ada sama sekali. Singkatnya, jika seandainya infrastuktur dan kondisi lingkungan *catchment area* dalam kualitas yang baik saja masih akan selalu ada potensi resiko banjir di wilayah DKI Jakarta, apalagi jika keduanya tidak

⁷⁴ Rahardjo, *Perkembangan Kota dan Permasalahannya*. (Jakarta, PT. Bina Aksara, 1993). h. 24.

berfungsi dengan baik akibatnya seperti yang terjadi sekarang. Bencana banjir semakin akrab dengan kehidupan masyarakat Jakarta dan sekitarnya setiap kali musim hujan tiba.⁷⁵

Banyak tempat di kota Jakarta yang permukaan tanahnya lebih rendah dari permukaan laut, sehingga sangat berpotensi mengalami bencana banjir. Ada beberapa factor yang mengakibatkan seringnya terjadi banjir di wilayah Jakarta, yang dapat merugikan penduduknya yaitu; penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh beban bangunan bertingkat dan eksploitasi air tanah yang berlebihan. Kemudian peningkatan permukaan air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Lalu curah hujan, banjir kiriman dari daerah lain serta drainase yang buruk yang banyak tersumbat oleh sampah yang menumpuk.⁷⁶

Alasan pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru yaitu pertama, risiko bencana alam minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Ketiga, lokasinya berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

⁷⁵ Van Bemmelen, *The Geologi of Indonesia*. (Government Printing Office, The Hague, 1949). h. 67.

⁷⁶ Rahardjo Adisasmita, *Opcit.*, h.103

Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare.⁷⁷

Lahan milik BUMN atau yang dikuasai pemerintah di Kalimantan Timur dicanangkan akan dapat mengurangi biaya untuk pembelian lahan dari masyarakat setempat. Selain itu kriteria lain yang menjadikan terpilihnya wilayah Kalimantan Timur antara lain, secara geografis Kalimantan Timur berada di tengah Wilayah Indonesia, potensi konflik sosial yang rendah yang mana masyarakat setempat memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, daya dukung tanah dan air baku yang memadai, memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan, dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur hal ini memudahkan aksesibilitas lokasi karena berdekatan dengan dua kota besar yakni Balikpapan dan Samarinda.⁷⁸

Penentuan lokasi ibu kota baru di Kalimantan timur jika dihat dari segi tingkatan atau kepentingan atau kekuatan substansinya yang tingkatan ini pada dasarnya merujuk pada skala prioritas dalam masalah, yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan. Seperti yang kita ketahui lokasi ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur ini lokasinya berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Dan

⁷⁷ Buku Saku, *Op.cit.*, h .9.

⁷⁸ *Ibid.*, h 12.

juga telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Serta telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare. Selain itu wilayah Kalimantan berada di tengah negara Indonesia jadi diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menyamaratakan perputaran ekonomi hingga ke wilayah yang masih timpang dalam perekonomian di wilayah Indonesia. Hal ini memudahkan pemerintah dalam pembangunan serta memudahkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di ibu kota baru. Jika lokasinya tidak se-strategis Kalimantan Timur mungkin akan membawa kesulitan dan kesempatan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.⁷⁹

C. Urgensi Pemindehan Ibu Kota Negara Republik Indonesia

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ibu kota, salah satu solusi yang bisa dilakukan sebuah negara adalah dengan memindahkan ibu kotanya. Tetapi sebelum itu dilakukan perlu ada analisis kuat dari berbagai aspek bidang, dari aspek keruangan, ekologis dan kewilayahan serta dampak sosial, ekonomi, dan politik, menghasilkan suatu pemikiran bahwa pemindahan ibu kota merupakan suatu keharusan.

Melihat rencana panjang dan gerak cepat Presiden Joko Widodo untuk memindahkan IKN perlu juga dipahami urgensi pemindahan IKN. Yaitu

⁷⁹ *Ibid.*, h.13

menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut.

IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020). Sedangkan di pulau-pulau lain di Indonesia pertumbuhan ekonomi masih belum merata.⁸⁰

Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang

⁸⁰ Muchtar Anshari Hamid Labetubun, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Penerbit Widina Bhakti Persada, 2021, Bandung) h. 27.

diharapkan sustainable, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan “pusat gravitasi” ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari “beban” yang harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². 2) Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020. 3) permasalahan lingkungan yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun sebagai negara demokrasi, ketika Negara telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui UU, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi

ekses pemindahan IKN. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI. Dengan berbagai fakta yang ada, didapat kecenderungan bahwa dalam analisis garis besar aspek keruangan, ekologis, serta dampak sosial, ekonomi, dan politik, menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan pemerintah demi mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang sudah terlampaui tinggi, serta menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan di negara ini, dan juga demi menciptakan ibu kota yang baik bagi kelangsungan pemerintahan Indonesia.⁸¹

D. Gagasan dan Polemik Pemindahan Ibu Kota Negara

Pro dan kontra atas rencana pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan tidak bisa terhindarkan dikarenakan rencana tersebut sebagai sebuah gagasan besar dan strategis untuk kemajuan bangsa. Polemik dari rencana pemindahan ini dianggap sebagai sebuah pengalihan opini serta kental dengan nuansa politis ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang masih terpuruk.

⁸¹ Wesley Liano Hutasoit. *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara*. (Jurnal Dedikasi vol.19. no. 2), (Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2018). h. 119-123.

Pemindahan ibu kota dipandang sebagai sebuah pemikiran yang visioner dan menjangkau ke depan untuk menghadapi tantangan di era global dan kompetitif menuju negara yang maju. Memindahkan ibu kota tentu memerlukan biaya yang sangat besar. Dengan estimasi biaya yang sangat besar ini, rencana pemindahan ibu kota menuai banyak tanggapan.

Pemindahan ibu kota bukan perkara mudah. Pemindahan ibu kota membutuhkan rentang waktu yang cukup lama untuk menyiapkan berbagai macam penunjang infrastruktur dasar untuk pusat pemerintahan. Infrastruktur dasar tersebut seperti pengadaan jalan, transportasi, energi listrik, hingga air bersih.⁸² Walaupun gagasan pemindahan ibu kota sudah sejak lama digambarkan dari gagasan ini timbul berbagai macam polemik, ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap gagasan tersebut, walau pada akhirnya terealisasi juga walaupun dalam prosesnya masih dalam tahapan perjalanan yang panjang. Gagasan wacana pemindahan ibu kota ini menuai banyak polemik di masyarakat, sebagai contoh ada yang pro dan ada yang kontra terhadap banjir di Jakarta, bagi yang terkena banjir berpendapat menginginkan ibu kota pindah, bagi yang tidak terdampak berpendapat tidak menginginkan ibu kota dipindahkan.

⁸² Denys Reva. *Capital City Relocation And Nasional Security: The Cases of Nigeria and Kazakhstan*. Mini-Dissertation Master of Security Studies (MSS). Departemen of Political Sciences University of Pretoria Faculty of Humanities, 2016. h. 1.

Argumentasi polemik pemindahan ini diantaranya, urgensi perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur padahal masalah kemiskinan di Indonesia masih tinggi, keuangan negara sedang dalam masa sulit, kecuali jika kita ada kelebihan anggaran dana yang memang dipersiapkan, perpindahan ibu kota bukan prioritas utama untuk menjawab permasalahan-permasalahan strategis nasional, lalu perlu adanya kajian akademis yang mendalam, terutama dari aspek Hukum Tata Negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa ibu kota adalah tempat seluruh rakyat Indonesia mengambil keputusan, maka MPR bersidang di ibu kota negara, semua uang negara yang dipakai oleh institusi negara akan diawasi oleh lembaga yang berkedudukan di ibu kota negara.

Menimbang beberapa alasan diperlukannya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ialah, beban demografi pulau Jawa telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berujung pada krisis air bersih, bencana banjir serta tanah longsor, produktifitas kerja yang mana Jakarta menjadi pusat pemerintahan sehingga para pekerja yang bekerja di daerah penyangga Jakarta menimbulkan masalah kemacetan, lalu ketidakmerataan pembangunan di Indonesia, selain alasan diatas alasan yang menjadi faktor diperlukannya pemindahan ibu kota ialah pulau Jawa sangat rentan bencana alam sedangkan bencana alam di pulau Kalimantan tidak serentan di pulau Jawa serta pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa akan

membawa dampak positif, khususnya bagi dunia usaha. Dengan terealisasinya pemindahan pusat pemerintahan, otomatis akan menciptakan satu kota metropolitan baru. Dengan pertimbangan keuangan negara, lingkungan hidup serta alasan Hukum Ketatanegaraan pemindahan ibu kota negara dapat dipertimbangkan kembali. Dampak yang jelas akan terjadi dalam pemindahan ini ialah kerusakan lingkungan dengan banyaknya pembangunan gedung dan infrastruktur lainnya yang akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dari sisi lingkungan hidup.⁸³

⁸³ Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adisasmita. *Logika Prmindahan Ibu Kota Jakarta*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011) h. 84.